

Peran Kaderisasi Partai Politik Dalam Pengajuan Calon Legislatif Dan Kepala Daerah

Rahmat Alghazali Zainur H¹

Abstract

This paper discusses the importance of regeneration of political parties in preparing qualified candidates for legislative and regional heads. Inclusive representation, especially in terms of gender justice, is also the focus of this writing. The purpose of this writing is to explore an understanding of the process of regeneration of political parties, the challenges faced, and efforts that can be made to improve the quality of regeneration and ensure more inclusive representation, especially in terms of gender justice. The research method used is a literature study. This study identified that the regeneration of political parties is an important process in preparing qualified candidates for legislative and regional heads. Efforts to improve the quality of cadres and ensure more inclusive representation need to be made. Challenges faced in the regeneration of political parties include favoritism, discrimination, lack of transparency, and minimal participation of women. Some efforts that can be made to improve the quality of cadre formation and achieve inclusive representation include implementing affirmative policies, gender quotas, special education and training, as well as building networks and mentoring.

Keywords: *Legislative Candidates, Cadres, Regional Heads, Political Parties*

Abstrak

Tulisan ini membahas pentingnya kaderisasi partai politik dalam mempersiapkan calon legislatif dan kepala daerah yang berkualitas. Representasi yang inklusif, terutama dalam hal keadilan gender, juga menjadi fokus penulisan ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggali pemahaman tentang proses kaderisasi partai politik, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kaderisasi dan memastikan representasi yang lebih inklusif, khususnya dalam hal keadilan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Data dikumpulkan melalui peninjauan sumber-sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan riset, serta dokumen-dokumen resmi terkait kaderisasi partai politik. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kaderisasi partai politik merupakan proses penting dalam mempersiapkan calon legislatif dan kepala daerah yang berkualitas. Upaya untuk meningkatkan kualitas kaderisasi dan memastikan representasi yang lebih inklusif perlu dilakukan. Tantangan yang dihadapi dalam kaderisasi partai politik mencakup favoritisme, diskriminasi, kurangnya transparansi, dan minimnya partisipasi perempuan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kaderisasi dan mencapai representasi yang inklusif antara lain menerapkan kebijakan afirmatif, kuota gender, pendidikan dan pelatihan khusus, serta membangun jaringan dan mentoring.

Kata kunci: *Calon Legislatif, Kaderisasi, Kepala Daerah, Partai Politik*

Pendahuluan

Kaderisasi partai politik merupakan suatu proses penting dalam dunia politik yang bertujuan untuk menghasilkan kader-kader berkualitas yang dapat diusung sebagai calon legislatif dan kepala daerah. Kader-kader yang berkualitas akan menjadi pilar utama dalam menjaga dan memperkuat partai politik, serta mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

Partai politik memiliki peran yang sangat vital dalam sistem politik suatu negara. Partai politik adalah wadah yang menghubungkan antara kehendak dan aspirasi masyarakat dengan kebijakan publik. Di dalam partai politik, terdapat berbagai macam mekanisme dan proses yang mengarah pada pemilihan calon legislatif dan kepala daerah. Salah satu proses yang paling mendasar adalah kaderisasi.²

¹ Rahmat Alghazali Zainur H, Universitas Islam Indonesia, Email: 22912038@students.uii.ac.id

² Anggoro, T., Yani, Y. M., Setiabudi, W., & Muradi, M. (2020). Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat Nasional Pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 95-106.

Kaderisasi merupakan upaya partai politik untuk menciptakan kader-kader yang memiliki kompetensi, integritas, dedikasi, dan visi yang jelas. Proses kaderisasi bertujuan untuk membentuk kader-kader yang mampu memahami dan mewujudkan cita-cita partai politik serta mampu melayani masyarakat dengan baik. Kaderisasi tidak hanya melibatkan proses seleksi dan pelatihan, tetapi juga pembinaan dan pengembangan kader yang berkelanjutan.

Tujuan dari kaderisasi partai politik adalah mempersiapkan kader-kader yang siap bertarung dalam kontestasi politik, baik sebagai calon legislatif maupun kepala daerah. Calon legislatif adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif untuk duduk di parlemen dan mengawasi serta ikut dalam pembuatan undang-undang. Sementara itu, kepala daerah adalah pemimpin pemerintahan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah untuk mengelola pemerintahan di tingkat daerah.

Kaderisasi menjadi sangat penting karena calon legislatif dan kepala daerah harus memiliki kualitas dan kapabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan berbagai pihak serta memimpin dengan baik.

Dalam proses kaderisasi, partai politik memiliki peran yang sangat penting. Partai politik harus memiliki mekanisme yang transparan, objektif, dan demokratis dalam memilih calon-calon terbaik. Partai politik juga perlu menyediakan pelatihan dan pendidikan politik yang memadai bagi kader-kadernya. Dalam hal ini, partai politik harus bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan politik, serta melakukan kerja sama dengan para ahli dan praktisi politik yang berpengalaman.³

Selain itu, partai politik juga harus memperhatikan aspek keadilan gender dalam proses kaderisasi. Kaderisasi yang inklusif akan menghasilkan representasi yang lebih baik dalam politik dan pemerintahan. Partai politik perlu memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengikuti proses kaderisasi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam dunia politik.

Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, partai politik juga perlu memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kaderisasi. Penggunaan teknologi dapat membantu partai politik dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi kader, serta memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara partai politik dengan kader-kadernya.

Dalam tulisan ini, akan dibahas secara mendalam mengenai proses kaderisasi partai politik untuk diajukan sebagai calon legislatif dan kepala daerah. Tulisan ini juga akan membahas peran partai politik, tantangan yang dihadapi dalam proses kaderisasi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kader-kader politik. Dengan meningkatkan kualitas kader politik, diharapkan partai politik dapat memberikan

³ Danny, W. U. P. (2018). Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pati 2017 (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).

kontribusi yang lebih baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah di dalam tulisan ini adalah.

- 1) Bagaimana proses kaderisasi partai politik dalam mempersiapkan calon legislatif dan kepala daerah yang berkualitas?
- 2) Apa peran partai politik dalam memfasilitasi proses kaderisasi yang efektif dan efisien?
- 3) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses kaderisasi partai politik untuk mengajukan calon legislatif dan kepala daerah?
- 4) Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kaderisasi partai politik dan memastikan representasi yang lebih inklusif, terutama dalam hal keadilan gender?

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif menggunakan studi literatur dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami isu kaderisasi partai politik dalam persiapan calon legislatif dan kepala daerah. Metode ini melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan riset, serta dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan kaderisasi partai politik. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber literatur yang relevan dengan topik kaderisasi partai politik. Sumber literatur tersebut dapat mencakup jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan riset, serta dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang atau kebijakan terkait partai politik dan kaderisasi. Pemilihan sumber literatur harus didasarkan pada kriteria keberterimaan, keaktualan, dan relevansi dengan topik penelitian. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber literatur yang relevan dengan topik kaderisasi partai politik. Sumber literatur tersebut dapat mencakup jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan riset, serta dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang atau kebijakan terkait partai politik dan kaderisasi. Pemilihan sumber literatur harus didasarkan pada kriteria keberterimaan, keaktualan, dan relevansi dengan topik penelitian.

Setelah identifikasi sumber literatur dilakukan, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dari sumber-sumber tersebut. Data dapat dikumpulkan melalui membaca secara cermat dan menyeluruh, mencatat informasi penting, dan menandai kutipan yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap ini, penting untuk menjaga keobjektifan dan kritis dalam mengumpulkan data agar memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu kaderisasi partai politik. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan membaca dan meninjau data secara sistematis, mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara data yang terkait dengan kaderisasi partai politik. Metode analisis yang dapat digunakan meliputi analisis isi, analisis tematik, atau analisis naratif. Dalam analisis data, perlu diperhatikan juga adanya perbedaan sudut pandang, pendekatan, atau teori dari berbagai sumber literatur yang digunakan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Kaderisasi Partai Politik dalam Mempersiapkan Calon Legislatif dan Kepala Daerah yang Berkualitas

Proses kaderisasi partai politik memainkan peran kunci dalam mempersiapkan calon legislatif dan kepala daerah yang berkualitas. Proses ini melibatkan serangkaian langkah dan mekanisme yang dirancang untuk mengidentifikasi, melatih, dan memperkuat kader-kader politik agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dalam tulisan ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai proses kaderisasi partai politik untuk mempersiapkan calon legislatif dan kepala daerah yang berkualitas.

Pertama-tama, proses kaderisasi dimulai dengan identifikasi bakat dan potensi kader. Partai politik perlu melakukan proses seleksi yang cermat untuk menemukan individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi dalam bidang politik. Seleksi ini dapat dilakukan melalui pendaftaran, wawancara, dan penilaian terhadap rekam jejak politik dan profesional para calon kader. Setelah identifikasi, calon kader yang terpilih akan mengikuti proses pelatihan dan pendidikan politik. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan politik, perundang-undangan, manajemen kampanye, komunikasi politik, kepemimpinan, dan keterampilan lain yang relevan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman calon kader tentang dunia politik, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat dan menyampaikan pesan politik secara efektif.⁴

Selain pelatihan, pendidikan politik juga menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi. Pendidikan politik melibatkan pembelajaran tentang ideologi partai, visi dan misi politik, serta pemahaman mendalam tentang sistem politik dan pemerintahan. Melalui pendidikan politik, calon kader akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan dan nilai-nilai partai politik, serta dapat menginternalisasi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang menjadi pijakan dalam politik. Selain itu, proses kaderisasi juga mencakup pengalaman lapangan dan partisipasi aktif dalam kegiatan politik. Calon kader akan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kampanye politik, kegiatan partai, dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Melalui pengalaman ini, mereka akan belajar langsung tentang dinamika politik, tantangan yang dihadapi, dan cara-cara untuk berinteraksi dengan masyarakat.

Selama proses kaderisasi, partai politik juga berperan dalam memberikan pembinaan dan pengembangan kader yang berkelanjutan. Partai politik harus memiliki program pembinaan yang terstruktur untuk memastikan perkembangan dan peningkatan kompetensi kader secara berkesinambungan. Program ini dapat berupa mentoring, diskusi rutin, pelatihan lanjutan, dan pemberian tanggung jawab politik

⁴ Hanafi, R. I. (2014). PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI INDONESIA: BEBERAPA CATATAN KRITIS UNTUK PARTAI POLITIK DIRECT ELECTION FOR LOCAL LEADERS IN INDONESIA: SOME CRITICAL NOTES FOR POLITICAL PARTIES. *Jurnal Penelitian Politik* | Volume, 11(2), 1-16.

yang bertahap. Selain mekanisme internal, partai politik juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan politik eksternal. Kerja sama ini dapat membantu partai politik dalam menyediakan sumber daya dan pengajar yang berkualitas untuk melengkapi program pelatihan dan pendidikan politik mereka. Kolaborasi dengan ahli dan praktisi politik yang berpengalaman juga dapat memberikan wawasan dan perspektif yang berharga bagi calon kader.⁵

Dalam proses kaderisasi, partai politik juga harus memperhatikan keadilan gender. Keterwakilan perempuan dalam politik masih menjadi tantangan di banyak negara. Oleh karena itu, partai politik harus memastikan adanya kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengikuti proses kaderisasi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam dunia politik. Dalam hal ini, partai politik perlu mengadopsi kebijakan afirmatif dan menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik. Secara keseluruhan, proses kaderisasi partai politik memainkan peran penting dalam mempersiapkan calon legislatif dan kepala daerah yang berkualitas. Identifikasi, pelatihan, pendidikan politik, pengalaman lapangan, pembinaan, dan kolaborasi eksternal merupakan langkah-langkah kunci dalam proses kaderisasi. Keberhasilan proses ini akan menciptakan kader-kader politik yang mampu memahami dan mewujudkan tujuan partai politik, serta melayani masyarakat dengan baik. Penting bagi partai politik untuk terus meningkatkan kualitas kaderisasi mereka agar dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dalam dunia politik dan pemerintahan.

Peran Partai Politik dalam Memfasilitasi Proses Kaderisasi yang Efektif dan Efisien

Peran partai politik dalam memfasilitasi proses kaderisasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas. Partai politik bertanggung jawab dalam menyediakan kerangka kerja dan mekanisme yang memungkinkan identifikasi, pelatihan, pendidikan politik, dan pengembangan kader yang optimal. Dalam tulisan ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai peran partai politik dalam memfasilitasi proses kaderisasi yang efektif dan efisien.

Pertama, partai politik memiliki peran utama dalam identifikasi bakat dan potensi kader. Partai politik perlu memiliki sistem seleksi yang cermat dan transparan untuk mendapatkan calon kader yang berkualitas. Mekanisme seleksi yang baik akan memastikan bahwa calon kader memiliki kompetensi, integritas, dedikasi, dan visi yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai partai politik. Partai politik juga perlu mengadopsi pendekatan yang inklusif dan beragam untuk memastikan representasi yang lebih baik dalam kaderisasi.⁶

⁵ Listianingsih, D. M. (2021). PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH DALAM UU NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN FUNGSI KADERISASI OLEH PARTAI POLITIK. "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(1), 26.

⁶ Muhammad, M. (2016). Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-kader Dpd Pan Kabupaten Majene. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 110-120.

Kedua, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan politik yang memadai bagi kader-kadernya. Partai politik perlu memiliki program pelatihan yang terstruktur dan komprehensif untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan kader dalam berbagai aspek politik. Pelatihan ini dapat meliputi pengetahuan politik, manajemen kampanye, komunikasi politik, kepemimpinan, dan keterampilan lain yang relevan. Dengan memberikan pelatihan yang baik, partai politik dapat memastikan bahwa kader-kadernya siap menghadapi tugas dan tantangan politik dengan baik.

Selain pelatihan, partai politik juga perlu memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya. Pendidikan politik melibatkan pembelajaran tentang ideologi partai, visi dan misi politik, serta pemahaman mendalam tentang sistem politik dan pemerintahan. Partai politik perlu menyediakan ruang bagi kader-kadernya untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan nilai-nilai partai politik. Pendidikan politik yang baik akan membantu membangun identitas politik kader dan memperkuat kesetiaan mereka terhadap partai.⁷

Selanjutnya, partai politik juga berperan dalam memberikan pengalaman lapangan kepada kader-kadernya. Melalui pengalaman langsung dalam kampanye politik, kegiatan partai, dan pelayanan publik, kader-kader dapat belajar secara praktis tentang dinamika politik dan tantangan yang dihadapi. Partai politik perlu memberikan kesempatan kepada kader-kader untuk terlibat dalam kegiatan politik di tingkat lokal maupun nasional. Pengalaman lapangan ini akan membantu mengasah keterampilan politik kader dan mempersiapkan mereka untuk peran yang lebih besar dalam politik.

Selama proses kaderisasi, partai politik juga harus memberikan pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada kader-kadernya. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui mentoring, diskusi rutin, dan penugasan tanggung jawab politik yang bertahap. Partai politik perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada kader-kadernya agar terus berkembang dan meningkatkan kompetensi politik mereka. Dengan adanya pembinaan yang berkesinambungan, partai politik dapat memastikan bahwa kader-kadernya tetap relevan dan mampu menghadapi perubahan politik yang terus berlangsung.

Selain itu, partai politik juga perlu menciptakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan politik eksternal. Kerjasama ini dapat berupa pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman antara partai politik dan lembaga-lembaga pendidikan politik. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan politik eksternal dapat membantu memperkaya program pelatihan dan pendidikan politik partai politik, serta memberikan perspektif yang berbeda dan pemahaman yang lebih luas kepada kader-kader.

⁷ Nellya, B., & Syuhada, B. (2021). STRATEGI REKRUTMEN KADER DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 1274-1284.

Secara keseluruhan, peran partai politik dalam memfasilitasi proses kaderisasi yang efektif dan efisien sangat penting dalam menciptakan kader-kader politik yang berkualitas. Melalui identifikasi, pelatihan, pendidikan politik, pengalaman lapangan, pembinaan, dan kolaborasi eksternal, partai politik dapat membentuk kader-kader yang mampu mengemban tugas dan tanggung jawab politik dengan baik. Keberhasilan proses kaderisasi bergantung pada keseriusan partai politik dalam menyediakan kerangka kerja yang baik dan mendukung bagi pengembangan kader-kadernya.

Tantangan yang dihadapi dalam proses kaderisasi partai politik untuk mengajukan calon legislatif dan kepala daerah

Proses kaderisasi partai politik untuk mengajukan calon legislatif dan kepala daerah tidaklah terlepas dari berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan ini dapat melibatkan faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan proses kaderisasi. Dalam tulisan ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses kaderisasi partai politik. Salah satu tantangan utama dalam proses kaderisasi adalah identifikasi bakat dan potensi kader yang berkualitas. Partai politik perlu melakukan seleksi yang cermat dan objektif untuk menemukan individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi dalam bidang politik. Namun, terkadang proses seleksi dapat terpengaruh oleh preferensi pribadi, nepotisme, atau pengaruh kepentingan tertentu. Tantangan ini dapat mengakibatkan calon kader yang kurang berkualitas atau tidak sesuai dengan nilai dan visi partai politik.

Selain itu, partai politik juga menghadapi tantangan dalam menarik minat dan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses kaderisasi. Terkadang, masyarakat cenderung merasa jauh dari politik atau skeptis terhadap partai politik. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya jumlah calon kader yang muncul atau minimnya dukungan masyarakat terhadap proses kaderisasi. Tantangan ini dapat diatasi dengan meningkatkan transparansi, komunikasi yang efektif, dan memperkuat hubungan antara partai politik dengan masyarakat.⁸

Selanjutnya, tantangan lainnya adalah kesenjangan gender dalam proses kaderisasi. Keterwakilan perempuan dalam politik masih menjadi masalah di banyak negara. Partai politik seringkali menghadapi kesulitan dalam menarik minat dan partisipasi perempuan dalam proses kaderisasi. Stereotip gender, bias budaya, serta hambatan sosial dan ekonomi dapat menjadi penghalang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Partai politik perlu mengadopsi kebijakan afirmatif dan menghilangkan hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan dalam proses kaderisasi. Penting untuk memastikan adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mendapatkan posisi kader politik yang berpengaruh.

⁸ Hanafi, R. I. (2014). PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI INDONESIA: BEBERAPA CATATAN KRITIS UNTUK PARTAI POLITIK DIRECT ELECTION FOR LOCAL LEADERS IN INDONESIA: SOME CRITICAL NOTES FOR POLITICAL PARTIES. *Jurnal Penelitian Politik* | Volume, 11(2), 1-16.

Selain tantangan internal, partai politik juga dihadapkan pada tantangan eksternal dalam proses kaderisasi. Salah satu tantangan eksternal adalah persaingan politik yang ketat. Partai politik harus bersaing dengan partai lain dalam merekrut kader-kader yang berkualitas. Persaingan politik yang ketat dapat mempengaruhi proses kaderisasi dengan menimbulkan ambisi politik yang tinggi, perang personalitas, atau upaya untuk merekrut kader dari partai politik lain. Partai politik perlu tetap berkomitmen pada prinsip dan nilai-nilai partai serta menjaga integritas dan kualitas kaderisasi dalam menghadapi tantangan persaingan politik.⁹

Selanjutnya, tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya. Proses kaderisasi yang efektif dan efisien membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dalam hal finansial, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Partai politik yang kekurangan sumber daya dapat menghadapi kesulitan dalam melaksanakan program pelatihan, pendidikan politik, atau pembinaan kader. Keterbatasan sumber daya juga dapat mempengaruhi kemampuan partai politik dalam melakukan identifikasi bakat, memfasilitasi pengalaman lapangan, dan menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal. Tantangan ini dapat diatasi melalui upaya penggalangan dana, kerjasama dengan pihak lain, serta pengelolaan sumber daya yang efisien.

Terakhir, tantangan yang tidak dapat diabaikan adalah korupsi dan praktik politik yang tidak etis. Dalam beberapa kasus, proses kaderisasi dapat terpengaruh oleh praktik korupsi seperti nepotisme, penyuapan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat mengancam integritas dan kualitas proses kaderisasi, serta merusak citra partai politik. Oleh karena itu, partai politik perlu mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, menjalankan praktik politik yang transparan dan akuntabel, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku korupsi dan tidak etis.

Secara keseluruhan, proses kaderisasi partai politik untuk mengajukan calon legislatif dan kepala daerah dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari identifikasi bakat yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat, kesenjangan gender, persaingan politik yang ketat, keterbatasan sumber daya, hingga praktik korupsi dan politik yang tidak etis. Penting bagi partai politik untuk menghadapi tantangan ini dengan strategi yang tepat, termasuk melalui peningkatan transparansi, komunikasi yang efektif, penerapan kebijakan inklusif, peningkatan kesadaran gender, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta tegakan nilai-nilai integritas dan etika politik. Dengan mengatasi tantangan ini, partai politik dapat memastikan bahwa proses kaderisasi mereka menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan mampu menjalankan tugas politik dengan baik.

Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Kaderisasi Partai Politik

Proses kaderisasi partai politik adalah tahapan penting dalam mempersiapkan calon legislatif dan kepala daerah yang berkualitas. Namun, untuk mencapai kualitas

⁹ Anggoro, T., Yani, Y. M., Setiabudi, W., & Muradi, M. (2020). Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat Nasional Pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 95-106.

kaderisasi yang optimal dan memastikan representasi yang lebih inklusif, terutama dalam hal keadilan gender, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif dari partai politik. Dalam tulisan ini, akan dijelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kaderisasi dan mencapai representasi yang lebih inklusif dalam konteks keadilan gender.

Pertama-tama, partai politik perlu menerapkan kebijakan afirmatif dan kuota gender. Kebijakan afirmatif dapat membantu mengatasi kesenjangan gender dalam politik dengan memberikan perlindungan dan peluang yang setara bagi perempuan. Salah satu bentuk kebijakan afirmatif yang umum adalah kuota gender, di mana partai politik menetapkan persentase tertentu posisi kader atau calon yang harus diisi oleh perempuan. Hal ini memberikan dorongan yang kuat untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam partai politik. Selain itu, partai politik juga dapat menerapkan kebijakan inklusifitas yang lebih luas, seperti memperhatikan keberagaman etnis, agama, dan latar belakang sosial lainnya.

Selanjutnya, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada kader perempuan. Program pendidikan dan pelatihan ini harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi politik, manajemen kampanye, dan negosiasi. Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kader perempuan akan membantu meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri mereka dalam berpartisipasi dalam partai politik. Partai politik juga harus memastikan bahwa program pendidikan dan pelatihan ini mudah diakses, fleksibel, dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi kader perempuan.¹⁰

Selain itu, penting juga untuk membangun jaringan dan mentoring antara kader perempuan dan kader laki-laki yang berpengalaman. Mentor dapat memberikan bimbingan, dukungan, dan nasihat kepada kader perempuan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam politik. Selain itu, mentor juga dapat membantu memperluas jaringan dan hubungan yang dapat mendukung kemajuan kader perempuan dalam partai politik. Partai politik perlu menyediakan ruang dan kesempatan bagi terbentuknya mentorship ini dengan mengatur program khusus dan memfasilitasi pertemuan reguler antara mentor dan mentee.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses kaderisasi juga harus ditekankan. Partai politik harus memastikan bahwa proses seleksi dan penilaian kader dilakukan dengan objektif dan adil. Mekanisme dan kriteria seleksi yang jelas harus ditetapkan dan dikomunikasikan kepada seluruh anggota partai. Selain itu, partai politik juga harus memiliki sistem yang memungkinkan aduan dan pengaduan terkait pelanggaran etika, diskriminasi gender, atau praktik yang tidak adil dalam proses kaderisasi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan kelegaan dalam partai politik serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait kaderisasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas kaderisasi dan mencapai representasi yang lebih inklusif, partai politik juga perlu melakukan pengkajian dan pembaruan terhadap

¹⁰ Danny, W. U. P. (2018). Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pati 2017 (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).

kebijakan dan program-program yang ada. Merevitalisasi program pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan, mengadakan seminar dan lokakarya tentang isu-isu gender, dan menggandeng lembaga dan organisasi terkait untuk memberikan wawasan dan dukungan lebih lanjut kepada kader perempuan dapat menjadi langkah-langkah yang efektif. Selain itu, partai politik harus secara aktif melibatkan kader perempuan dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam partai politik.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam proses kaderisasi. Partai politik perlu menjalin komunikasi dan interaksi yang lebih erat dengan masyarakat, khususnya dengan kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan perempuan. Mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari masyarakat akan membantu partai politik memahami dinamika sosial dan menyesuaikan strategi kaderisasi mereka. Partai politik dapat mengadakan forum-dialog, diskusi terbuka, atau konsultasi publik untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan calon kader dan merumuskan program partai politik yang lebih inklusif.

Terakhir, partai politik perlu menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keberagaman. Partai politik harus menghindari praktek diskriminasi, bias gender, atau favoritisme dalam proses kaderisasi. Partai politik harus menegakkan standar etika politik yang tinggi dan memberikan contoh kepemimpinan yang adil dan inklusif. Dengan menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ini, partai politik akan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan memperkuat demokrasi dalam negara.¹¹

Secara keseluruhan, meningkatkan kualitas kaderisasi partai politik dan memastikan representasi yang lebih inklusif, terutama dalam hal keadilan gender, adalah tantangan yang harus dihadapi secara serius oleh partai politik. Upaya-upaya yang telah dijelaskan di atas, seperti penerapan kebijakan afirmatif dan kuota gender, pendidikan dan pelatihan khusus, mentoring, transparansi dan akuntabilitas, pengkajian kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan, akan membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan merata. Dengan demikian, partai politik dapat menghasilkan kader-kader yang berkualitas, representatif, dan mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Penutup

Melalui tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa kaderisasi partai politik bukanlah sekedar proses rekrutmen dan seleksi kader, tetapi juga melibatkan pembinaan, pengembangan, dan pendidikan bagi kader-kader yang berpotensi. Dalam konteks ini, kualitas kaderisasi menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan partai politik dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Selain itu, perlu ditekankan

¹¹ Hanafi, R. I. (2014). PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI INDONESIA: BEBERAPA CATATAN KRITIS UNTUK PARTAI POLITIK DIRECT ELECTION FOR LOCAL LEADERS IN INDONESIA: SOME CRITICAL NOTES FOR POLITICAL PARTIES. *Jurnal Penelitian Politik* | Volume, 11(2), 1-16.

bahwa kaderisasi partai politik harus memperhatikan aspek representasi yang inklusif, terutama dalam hal keadilan gender. Peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam partai politik menjadi hal yang penting untuk mencapai keberagaman dan kesetaraan gender dalam proses politik. Langkah-langkah seperti menerapkan kebijakan afirmatif, kuota gender, pendidikan dan pelatihan khusus, serta membangun jaringan dan mentoring antara kader perempuan dan laki-laki dapat mendukung terciptanya representasi yang lebih inklusif dalam partai politik.

Namun, terdapat tantangan yang perlu dihadapi dalam proses kaderisasi partai politik. Praktek favoritisme, diskriminasi, kurangnya transparansi, dan minimnya partisipasi perempuan menjadi hambatan yang perlu diatasi. Untuk mengatasi tantangan ini, partai politik harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keberagaman. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam proses kaderisasi menjadi hal yang sangat penting. Untuk meningkatkan kualitas kaderisasi partai politik dan memastikan representasi yang lebih inklusif, diperlukan upaya yang melibatkan partai politik, kader, dan masyarakat secara keseluruhan. Partai politik perlu menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, memfasilitasi mentoring antar-kader, menjalin komunikasi yang erat dengan masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kaderisasi.

Secara keseluruhan, tulisan ini menggarisbawahi pentingnya kaderisasi partai politik dalam mempersiapkan calon legislatif dan kepala daerah yang berkualitas. Dengan menjaga kualitas kaderisasi, memastikan representasi yang inklusif, mengatasi tantangan yang dihadapi, dan melibatkan partai politik, kader, dan masyarakat, maka partai politik dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anggoro, T., Yani, Y. M., Setiabudi, W., & Muradi, M. (2020). Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat Nasional Pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 95-106.
- Danny, W. U. P. (2018). Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pati 2017 (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- Hanafi, R. I. (2014). **PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI INDONESIA: BEBERAPA CATATAN KRITIS UNTUK PARTAI POLITIK DIRECT ELECTION FOR LOCAL LEADERS IN INDONESIA: SOME CRITICAL NOTES FOR POLITICAL PARTIES**. *Jurnal Penelitian Politik* | Volume, 11(2), 1-16.
- Husna, A., Manan, F., & Herdiansah, A. G. Fungsi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai GERINDRA pada Pemilihan Umum 2019 Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(1), 65-73.
- Listianingsih, D. M. (2021). **PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH DALAM UU NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN FUNGSI KADERISASI OLEH PARTAI POLITIK**. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 26.

- Muhammad, M. (2016). Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-kader Dpd Pan Kabupaten Majene. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 110-120.
- Nellya, B., & Syuhada, B. (2021). STRATEGI REKRUTMEN KADER DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 1274-1284.